

## ABSTRAKSI

**Mukti Kamil**, "*Pelaksanaan Pasal 32 ayat (2) PP No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek Di PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Bandung I.*

Peran serta tenaga kerja dalam Pembangunan Nasional sangat dibutuhkan, terutama dalam usaha pemerintah untuk membentuk negara kesejahteraan khususnya bidang ekonomi. Peran serta tenaga kerja tersebut harus diimbangi dengan tingkat kesejahteraan dari tenaga kerja itu sendiri, upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja direalisasikan dalam bentuk penyelenggaraan program jamsostek yang berfungsi untuk menanggulangi risiko-risiko sosial ekonomi yang dialami tenaga kerja. Agar merasa tenang dalam proses produksi, maka diperlukan suatu jaminan yang dapat meningkatkan kinerja mereka dalam perusahaan. Salah satunya adalah jaminan hari tua (JHT). Dimana jaminan tersebut memberikan tunjangan bagi masa depan tenaga kerja. Agar pelaksanaan jaminan hari tua tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka diperlukan pengawasan baik dari segi hukum maupun materi pelaksanaannya. Hal ini yang mendorong penulis untuk mengangkat masalah tersebut dalam penelitiannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang pelaksanaan program jamsostek dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia, juga untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 32 ayat (2) dalam penyelenggaraan program jaminan hari tua (JHT) khususnya di PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Bandung I. Dan untuk mengetahui pentingnya pendekatan hukum secara pasti dalam penyelenggaraan program JHT tersebut di PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Bandung I.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode penelitian *deskriptif analitis* dan jenis data *kualitatif*. Sumber data yang digunakan ada tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui dua tahap, yaitu melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif* dan *sosiologis*.

Data yang dihasilkan dari pihak PT, Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Bandung I merupakan satu acuan untuk membuktikan terlaksana atau tidaknya Pasal 32 ayat (2) PP No. 14 Tahun 1993 di PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Bandung I. Disamping itu pula sebagai upaya perbaikan hukum dimasa yang akan datang.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pasal 32 ayat (2) PP No. 14 Tahun 1993 di PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Bandung I ternyata tidak terlaksana secara pasti, karena adanya berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya baik faktor internal maupun eksternal, Sehingga dalam hal ini penting adanya perbaikan atau peninjauan kembali terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek baik secara materi maupun pelaksanaannya.